

RINGKASAN

Pemilihan umum dalam negara Demokrasi dimaknai sebagai bentuk puncak dari partisipasi politik masyarakat, pemilu memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan dan kekuatan sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya mengenai kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, namun mencakup keterlibatan aktif dalam penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tentang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai sarana pendidikan politik warga. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, Pertama Bawaslu Kabupaten Cilacap menetapkan Desa Kalikudi sebagai project kampung pengawasan pemilu dengan mempertimbangkan desa Kalikudi merupakan desa yang acap kali ditemukan pelanggaran pemilu, Kedua, Program partisipatif dalam kampung pengawasan meliputi; deklarasi, pembuatan spanduk atau baliho, workshop, forum warga, patroli pengawasan dan posko pengawasan, Ketiga, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pelanggaran pemilu dan melaporkan secara resmi masih rendah.

Kata Kunci : Bawaslu, Kampung Pengawasan, Pemilu

SUMMARY

General elections in a democratic country are interpreted as the peak form of community political participation. Elections have a central role in ensuring the will and strength of the democratic system. Community participation in election monitoring does not only involve physical presence at the polling place, but includes active involvement in education, monitoring and reporting. The purpose of writing this article is to analyze the extent of community participation in the Cilacap Regency Bawaslu Participatory Supervision Village program as a means of political education for citizens. This article uses a qualitative method with a case study approach through data collection techniques from interviews, observation and documentation. The results of this research reveal that, Firstly, Bawaslu of Cilacap Regency designated Kalikudi Village as an election monitoring village project by considering that Kalikudi village is a village where election violations are often found. Second, participatory programs in monitoring villages include; declarations, making banners or billboards, workshops, citizen forums, surveillance patrols and monitoring posts. Third, public participation in providing information regarding election violations and official reporting is still low.

Keywords: Bawaslu, Supervision Village, Election